

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Semarang.

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di Kota Semarang dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan PTS menerapkan kebijakan penjaminan mutu berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 dan Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, padahal saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

a. Pangkalan data pendidikan tinggi (PD-Dikti)

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS melalui pangkalan data pendidikan tinggi dilakukan PTS setiap saat dengan laporan secara periodik kepada PD-Dikti di Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dan PD-Dikti Nasional. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa analisis faktor penghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terlihat dari data kegiatan PTS yang masuk pada PD-Dikti Nasional belum semuanya mencakup kegiatan PTS sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, tetapi masih menyimpan data akademik PTS saja, sehingga PD-Dikti belum

bisa dipakai sebagai sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi.

b. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS melalui SPMI dilakukan oleh PTS sesuai dengan dengan Pasal 53 UU No.12 Tahun 2012. Hal ini merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS karena SPMI merupakan otonomi perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi guna menghadapi akreditasi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga penetapan standar mutu pada SPMI masing-masing PTS berbeda. Dampak otonomi PTS dalam penentuan SPMI mengakibatkan Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi tidak dapat diseragamkan, sehingga yang hanya dapat digunakan sebagai alat kontrol penjaminan mutu adalah pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS melalui SPME dilakukan sesuai ketentuan oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui pemerintah dalam melakukan SPME/ akreditasi setiap 5 tahun sekali atas usulan perguruan tinggi dengan memenuhi tujuh standar minimal. Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS melalui SPME adalah aspek komunikasi dan sumber daya.

Kurangnya komunikasi dalam bentuk koordinasi antara BAN-PT dan LAM dengan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah ketika akan melakukan akreditasi pada PTS maupun program studi merupakan temuan peneliti di lapangan. Selama ini komunikasi antara BAN-PT/LAM dengan PTS yang akan diakreditasi dilakukan secara langsung tanpa melibatkan Kopertis Wilayah VI, sehingga Kopertis tidak bisa memantau hasil evaluasi PTS ataupun program studi melalui akreditasi.

2, Aspek Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di kota Semarang

a. Aspek Pendukung

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta sangat dipengaruhi oleh konten kebijakan antara lain kepentingan dan karakteristik perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh PTS akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing PTS. Disamping itu kebijakan penjaminan mutu memberi manfaat bagi perguruan tinggi dan juga masyarakat, artinya dengan adanya kebijakan penjaminan mutu pada PTS, merupakan aspek pendukung implementasi kebijakan, karena sebagai cerminan pertanggungjawaban pada masyarakat pengguna dalam menentukan pilihannya untuk mengikuti pendidikan pada PTS,

Konteks kebijakan dalam implementasi penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta antara lain adanya komitmen PTS untuk melaksanakan tugas dengan patuh dan daya tanggap yang cukup baik dari PTS dengan cara menyampaikan laporan tepat waktu pada PD-Dikti Nasional. Hal ini merupakan aspek pendukung bagi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi.

Komunikasi juga merupakan aspek pendukung dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi, khususnya berisi informasi tentang kebijakan penjaminan mutu di lingkungan masing-masing PTS, namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan Pemerintah seperti tertuang dalam SPM-Dikti. Metode komunikasi yang paling efektif dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, pendidikan dan latihan sehingga tidak terjadi mispersepsi dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan aspek pendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia dan ketersediaan dana. PTS dapat meningkatkan kualitas SDM yang mampu mengelola SPM-Dikti dan memiliki dana yang cukup sehingga penyelenggaraan kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.

b. Aspek Penghambat

Aspek penghambat khususnya berupa penetapan dan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi yang

dilakukan oleh PTS di kota Semarang tidak sepenuhnya mengacu pada SPM-Dikti tetapi disesuaikan dengan visi perguruan tinggi, organisasi PTS (Yayasan), Statuta PTS dan departemen yang terkait.

Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi merupakan kebijakan yang didesentralisasikan pemerintah pada PTN dan PTS, dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi, namun tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dikti. Hal ini sebenarnya memberikan kemudahan pada perguruan tinggi, namun ini menjadi aspek penghambat pada PTS untuk mengembangkan standar pada SPMI mereka karena tidak boleh bertentangan dengan standar DIKTI, sehingga pada umumnya PTS dalam menetapkan standar tersebut minimal seperti ketentuan DIKTI.

Kekurangan SDM terutama yang bertugas untuk mengelola sistem penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan faktor penghambat karena tidak dapat menangani seluruh permasalahan kebijakan penjaminan mutu pada PTS di Kota Semarang, di samping itu fasilitas yang dimiliki oleh PTS masih belum optimal. Aspek komunikasi juga merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi, hal ini dikarenakan intensitas komunikasi yang dilakukan masih kurang pada PTS maupun antara PTS dengan pemerintah. Hal ini menjadi faktor

penghambat sehingga implementasi kebijakan penjaminan mutu berjalan kurang efektif.

3. Rumusan Model Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.

Usulan model yang disampaikan oleh peneliti dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta perlu penekanan pada *content of policy* yaitu pada aspek derajat perubahan yang diharapkan dan sumber daya yang dikerahkan. Derajat perubahan yang diharapkan adalah semua kalangan akademisi baik yang memimpin maupun yang dipimpin harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan. Komitmen tersebut berupa perubahan *mindset* pada seluruh civitas akademika perguruan tinggi bahwa, kewajiban melaksanakan penjaminan mutu itu bukan hanya pada pimpinan perguruan tinggi, namun di semua organisasi perguruan tinggi, terutama dalam menjalankan SPMI.

Aspek sumber daya yang dikerahkan juga perlu ditambahkan, baik oleh perguruan tinggi masing-masing maupun pada Kopertis Wilayah VI sebagai lembaga Wasdalbin PTS yang ada di kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Kemudian pada fenomena *context of policy* perlu ada perbaikan pada aspek

karakteristik lembaga terutama dalam penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penjaminan mutu pada PTS

Fenomena komunikasi juga perlu mendapat perhatian khususnya pada aspek sosialisasi kebijakan dan intensitas komunikasi. Aspek sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara terus menerus/ *continue*. Hal ini dilakukan oleh badan atau lembaga yang menangani kebijakan penjaminan mutu di lingkungan PTS. Kebijakan ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Ditjen Dikti seperti tertuang dalam SPM Dikti. Intensitas komunikasi juga harus mendapat perhatian khusus dan perlu ditingkatkan terutama antar perguruan tinggi dan antara organisasi perguruan tinggi dengan Kopertis

6.2. Rekomendasi

Guna menunjang terjaminnya implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yang mencakup kondisi internal dan eksternal berdasarkan analisis teori dan temuan empiris sebagai berikut:

- a) Kopertis dan PTS perlu melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan SPM Dikti sehingga memiliki kemampuan atau kapabel dalam pengelolaan penjaminan mutu perguruan tinggi.

- b) Perlunya koordinasi antara BAN-PT ataupun LAM dengan Kopertis *Wilayah VI* ketika akan melakukan akreditasi pada PTS, sehingga Kopertis dapat melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada PTS dibawah lingkup kerjanya.

6.3. Implikasi Hasil Penelitian

6.3.1. Implikasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan peneliti, maka implikasi teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta dilakukan berdasarkan fenomena yang diamati yaitu konten kebijakan, konteks kebijakan, komunikasi dan sumber daya memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan penjaminan mutu.

Implikasi teori dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang, dimana beberapa fenomena memerlukan penekanan. Misalnya, derajat perubahan yang diharapkan pada konten kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi sehingga kualitas PTS mengalami peningkatan. Teori yang disampaikan pada penelitian ini saling mendukung dan melengkapi. Hal ini dikarenakan tidak ada satu teori yang disampaikan ahli kebijakan dapat memenuhi keberhasilan implementasi. Contoh: dalam teori yang disampaikan oleh Grindle, dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks kebijakan. Teori ini tidak

cukup untuk membuktikan keberhasilan implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi, akan tetapi masih dipengaruhi oleh fenomena yang lain. Demikian juga Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa ada 6 (enam) fenomena yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu: standar dan tujuan kebijakan; kinerja kebijakan; sumber daya; komunikasi; karakteristik badan pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi dan politik; serta sikap pelaksana. Fenomena yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn tidak sepenuhnya digunakan dalam meneliti implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi. Demikian juga halnya dengan teori yang disampaikan oleh Edward III (1980), bahwa implementasi kebijakan saling bersinergi dalam mencapai tujuan mencakup empat variabel antara lain: Komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Teori di atas juga sesuai dengan pendapat Goggin (1990) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan antar organisasi.

Teori-teori di atas saling melengkapi dan bersinergi sehingga menurut hemat penulis fenomena yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta tidak bisa hanya menggunakan salah satu dari teori yang disampaikan oleh ahli kebijakan tetapi menggunakan gabungan teori- teori di atas. Temuan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi sangat ditentukan konten kebijakan, konteks kebijakan, komunikasi dan sumber daya yang

dikerahkan dalam implementasi, hal ini sesuai dengan alur pikir penelitian yang digambarkan peneliti pada gambar 2.8. Disamping itu aspek regulasi merupakan fenomena yang dominan dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi, karena dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah sangat menentukan standar kebijakan yang akan ditetapkan oleh PTS. Oleh karena itu ketegasan pemerintah dalam regulasi tentang penjaminan mutu sangat diperlukan.

6.3.2. Implikasi Praktis

Kebijakan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai pedoman penyelenggaraan penjaminan mutu pada PTS memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya merupakan acuan baku bagi perguruan tinggi sehingga kebijakan penjaminan mutu yang ditetapkan oleh PTS tidak boleh bertentangan dengan SPM-DIKTI. PTS harus melampaui baik secara kuantitas dan kualitas standar nasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Ditjen Dikti.

Kelemahan yang ada pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi antara lain:

1. Kebijakan pemerintah dalam hal sistem penjaminan mutu perguruan tinggi belum mengakomodasi karakteristik yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta.
2. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang memuat seluruh informasi perguruan tinggi baik kegiatan akademik maupun non

akademik, pada kenyataannya belum terlaksana. Artinya PD-Dikti di tingkat nasional masih berisi informasi kegiatan akademik perguruan tinggi saja sedangkan kegiatan non akademik belum. Oleh karena itu PD Dikti yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat tentang perguruan tinggi belum sepenuhnya dapat memberikan keterangan yang rinci dalam memberikan gambaran tentang perkembangan yang terjadi pada perguruan tinggi tersebut.

3. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh BAN-PT dan LAM perlu aturan yang mengikat tentang pembiayaan akreditasi yang ditanggung pemerintah dan perguruan tinggi ataupun program studi yang akan diakreditasi. Dalam hal ini penetapan biaya akreditasi pada perguruan tinggi ataupun program studi ditentukan besarnya sama tanpa membedakan lembaga yang akan menangani proses tersebut.

6.4. Keterbatasan Penelitian

Implementasi kebijakan penjaminan mutu perguruan tinggi tidak terlepas dari 3 (tiga) aspek yaitu pangkalan data pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam mengkali implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta, banyak fenomena yang dapat

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Namun, karena keterbatasan peneliti dan kemampuan analisis serta keterbatasan alokasi waktu serta tenaga maka peneliti hanya menganalisis 4 (empat) fenomena yang mencakup **konten kebijakan, konteks kebijakan, komunikasi serta sumber daya.**